

EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DODI SURYADIN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda bagi terpidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori retributive, yang memandang bahwa pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Disamping itu, teori yang digunakan adalah teori tujuan pemidanaan yang integrative, yang melihat bahwa pemidanaan merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana denda sebagai salah satu alat politik kriminal yang dapat digunakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan pidana. Pelaksanaan pidana denda bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dijatuhkan dalam jumlah yang tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ternyata tidak diancamkan dengan jumlah yang sangat tinggi. Seluruh kasus pada wilayah Kejaksaan Negeri Banten, tidak ada pelaku yang melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan. Pelaku lebih memilih melaksanakan pidana penjara sebagai pengganti denda dibandingkan dengan membayarkan pidana denda itu sendiri. Hal tersebut karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh pelaku serta munculnya kemungkinan bagi para pelaku untuk mengganti pidana denda dengan pidana penjara yang waktunya sangat singkat dan dianggap menguntungkan. Ancaman pidana denda dengan jumlah yang terlalu tinggi serta diberikannya kemungkinan untuk mengganti pelaksanaan pidana denda dengan pidana penjara pengganti dalam waktu singkat akan mengakibatkan pidana denda menjadi tidak terlalu menakutkan bagi para pelaku tindak pidana.

Penulis menyarankan agar jumlah ancaman pidana denda bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 patut ditinjau ulang, yang dilakukan dengan cara merumuskan jumlah ancaman pidana denda baik yang dirumuskan sebagai maksimum khusus dan minimum khusus secara lebih rendah. Penetapan pidana denda hendaknya dapat menaksir terlebih dahulu harga dari narkotika atau precursor menurut jenis dan beratnya sehingga pidana denda dapat dirumuskan secara tepat.

Kata Kunci : Penerapan Pidana Denda

EFFECTIVENESS CRIMINAL PUNISHMENT BUSINESS CRIME AGAINST FINE NARCOTICS

DODI SURYADIN

ABSTRACT

This study was conducted to Determine the execution of criminal penalties for convicted drug based on Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The theory used in this research is the retributive theory, the which holds that punishment of wrongdoing is fair Because It will improve the balance of moral ravaged by crime. In addition, the theory used is the theory of the integrative purposes of punishment, who saw that the punishment is a disruption of the balance, harmony and harmony in society. The method used in this thesis Juridical normative research, the research conducted by literature study. Literature study conducted on the data secondary roomates includes official documents, books, research results. Results of this study concluded that the penalty as one of the criminal political tool that can be used to Achieve the objectives that have been set out in a criminal policy. Execution of criminal penalties for perpetrators of abuse and illicit trafficking are dropped in high quantities by Act No. 35 of 2009, was not threatened with a very high amount. All cases in the area of Banten District Court, none of the perpetrators are fulfilling criminal fine imposed. Perpetrators prefer to implement Imprisonment in lieu of fines as Compared to paying penalty itself. This is due to economic constraints that are owned by the perpetrator as well as the emergence of the possibility for actors to replace the criminal penalties with Imprisonment that time is very short and is Considered beneficial. The threat of criminal penalties with a number that is too high, and It provides the possibility to replace the execution of criminal penalties to Imprisonment for a replacement in a short time will lead to criminal penalties can be less intimidating for the perpetrators of criminal acts. The authors suggest that the number of threats of criminal penalties for perpetrators of abuse and illicit trafficking in Law No. 35 of 2009 should be reviewed restaurants, the which is done by formulating a good number of threats of criminal penalties speci Formulated as maximum and minimum are less specific. Determination of penalty should be Able to assess in advance the price of a narcotic or precursor According to the type and severity of criminal penalties that can be Formulated appropriately.